

**ORANG CINA DI BANDUNG, 1930-1960**  
**Merajut Geliat Siasat Minoritas Cina**

Oleh;  
**Tanti Restiasih Skober, S.S., M.Hum.**

**Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra**  
**Universitas Padjadjaran**

**KONFERENSI NASIONAL SEJARAH VIII**  
**Tanggal 14 s.d 17 November 2006**  
**Hotel Millenium**  
**Jakarta**

**ORANG CINA DI BANDUNG, 1930-1960**  
**Merajut Geliat Siasat Minoritas Cina**

Oleh;  
**Tanti Restiasih Skober, S.S., M.Hum.**  
**Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra**  
**Universitas Padjadjaran**

**Pengantar**

Diskursus sejarah orang Cina kerap berbias stereotip. Mereka tidak hanya diposisikan dalam lingkaran eksklusif, tertutup, mementingkan diri sendiri, egoistik juga kerap disebut pelit. Meski begitu, muncul pula warna khas yang kadang kontras. Bias setereotip di atas, pada posisi tertentu dianggap dekat dengan rakyat kecil. Hal lainnya, berbekal sebutan 'kelompok minoritas', orang Cina ternyata piawai dalam mesiasati keberadaannya sebagai mahkota ekonomi yang signifikan. Kemampuani di bidang ekonomi itu jauh di atas kemampuan penduduk pribumi.

Kusnaka Adimihardja yang mengamati peranan ekonomi etnis Cina di Bandung menekankan bahwa orang Cina dulu selalu diberi kesempatan yang lebih baik oleh pemerintah kolonial Belanda (Adimihardja, 1976:26-29). Akan tetapi, Daoed Joesoef, sebelum menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, membantah adanya pemberian hak istimewa oleh Belanda. Menurut Daoed Joesoef, Pemerintah Hindia Belanda justru mengasingkan orang Cina. Beberapa jabatan tertutup bagi orang Cina. Termasuk tidak boleh memasuki sekolah tertentu, tidak boleh membeli tanah. Selain itu etnis Cina hanya boleh tinggal di suatu daerah tertentu yang dikenal sebagai Pecinan (Aditjondro, 1978:29).

Komunitas pecinanan tentu saja mengisyaratkan bahwa, orang-orang Cina di Indonesia sering disebut dengan golongan minoritas. Sepintas lalu, makna minoritas itu dikaitkan dengan jumlah mereka yang lebih kecil dibanding beberapa suku bangsa lain di Indonesia, misalnya Jawa dan Sunda (Poerwanto, 2005:6). Di Bandung, misalnya, dari

tahun 1930 sampai dengan 1960, orang Cina hanya berkisar 10% dari komposisi penduduk pada saat itu. Sebagai minoritas, yang Cuma 10 persen itu, orang Cina tentu saja butuh atmosfir yang lebih menggetarkan ruang hidupnya. Tak aneh bila mereka cenderung tak juga berhenti memproyeksikan usaha dan strategi tertentu agar bisa tetap bertahan hidup.

Atmosfir yang meggetarkan itu, bisa kita petik dari peristiwa sejarah. pada tanggal 9 Januari 1821. Gubernur Jenderal G.A. Baron van der Capellen bersikeras bahwa wilayah Karesidenan Priangan tertutup bagi semua orang Cina, kecuali mereka yang telah mendapat ijin dari Residen Priangan. Menurut Cator (1936:17), pembatasan ini pada dasarnya agar orang Cina diberi wilayah yang layak di daerah Batavia dan Cirebon. Lagi pula pembatasan ini juga tidak hanya berlaku bagi orang-orang Cina, tapi juga bagi orang-orang asing lainnya. Terlebih lagi, pada hakikatnya, saat itu, kehidupan orang Cina jauh lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang asing lainnya.

Itu menurut Cator, tapi disebabkan itu pula orang Cina tak cukup berhenti berdiri pada posisi itu. Mereka tebarkan siasat. Dan berkat upaya yang tak juga berhenti mendaur ulang strategi toh akhirnya simpati dari elite negeri berpihak pada orang Cina. Hingga berkat desakan berbagai pihak maka Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1856 mencabut aturan pembatasan tersebut.

Penjara Cimahi, Jawa Barat adalah saksi sejarah betapa parahnya orang cina di era pendudukan Jepang. Dan bagi orang Cina era pendudukan Jepang di Indonesia ini bagaikan lingkaran perumitan yang sulit diurai. Secara umum, kebijakan politik pendudukan Jepang terhadap minoritas Cina di Jawa tidak dapat dilepaskan dari Panglima Tertinggi tentara ke-16 Letjen Imamura.

Kaki tangan Letjen Imamura, tak lama berselang setelah pendaratannya, mengadakan pembersihan dengan menangkap tokoh-tokoh gerakan anti Jepang. Di sini, tak sedikit orang-orang Cina yang sebelumnya memiliki hubungan emosional yang bagus dengan Hindia

Belanda enggan mengakui keberadaan pemerintahan Jepang. Tak pelak, mereka dikejar-kejar, ditangkap kemudian ditahan di penjara Cimahi, Jawa Barat (Noordjanah, 2004:85).

Implikasi akibat kontrol pihak Jepang di bidang ekonomi melahirkan sebuah ruang bisnis Cina yang khas, membias dan tak terukur. Dengan adanya beragam bentuk larangan dan pengawasan pada berbagai sektor ekonomi, tentu saja akan menimbulkan perdagangan ilegal dalam skala yang cukup besar di Bandung. Hal ini, diadopsi orang Cina sebagai peluang yang kelak akan mengukuhkan diri mereka sebagai pensiasat dagang yang piawai.

Pecinaan di Bandung menyimpang begitu banyak catatan sejarah, lanskap holistik yang memayungi perkembangan orang Cina di Bandung. Perputaran waktu antara 1930 sampai dengan 1960 pada dasarnya merupakan titik awal dalam penelusuran sejarah komunitas orang Cina di Bandung. Lebih dari itu tulisan ini pada dasarnya ingin merajut kondisi orang Cina di Bandung dengan latar tiga masa kekuasaan.

Dialektika seputar orang Cina di Indonesia sebagai pensiasat dagang yang piawai inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk menelusurinya. Kupasan ini terbatas pada kehidupan orang Cina di Bandung. Sebuah analisa akan penulis urai apakah ada benang merah antara kebijakan pemerintah terhadap orang Cina di Bandung dengan geliat strategi Komunitas minoritas agar jatidiri mereka tetap pada posisi pencerahan. Juga akan dikaji keterhimpitan mereka pada akhirnya mencetuskan etos kerja yang tak pernah berhenti untuk letih. Mereka *survive* terhadap tekanan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Meski pada posisi tertentu, pada setiap jamannya, harus diakui peran sentral orang Cina khususnya di bidang ekonomi kadang dinilai *miring* oleh bangsa ini.

Memasukii ruang dan waktu, dalam memetakan kehidupan sosio-kultural sejarah orang Cina di Bandung, tentunya akan bersinggungan dengan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi adaptasi etnis Cina. Di sini akan muncul kebijakan pemerintah yang terkadang tidak berpihak. Kalaupunh ada keberpihakan cenderung bersifat dikotomi. Di titiki

inilah, dikotomi mayoritas dan minoritas maupun penguasa dan yang dikuasai menghasilkan siasat etnis Cina.

Artinya, permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah; bagaimana siasat ekonomi yang dilakukan orang Cina di Bandung dalam tiga masa kekuasaan. Makna “siasat”, adalah sebuah geliat usaha sekaligus pencaharian-pencaharian kreatif agar tetap eksis sebagai makhluk sosial yang kulturistis. Geliat usaha ini mencuat bukan hanya sebagai kodrat manusia minoritas belaka, tapi lebih cenderung disebabkan pada pola kearifan budaya Cina. Artinya lagi, “Siasat” dalam konteks penelitian ini mencoba merajut benang sejarah kognisi dan tingkah laku etnis Cina dalam menyikapi tekanan terhadap kehidupan sosio kultural di wilayah Pecinan.

### **Orang Cina di Bandung Pada Tiga Masa Kekuasaan**

Sejak abad ke-19, orang Hakka mulai bermigrasi ke Jawa Barat, karena tertarik oleh perkembangan Batavia serta dibukanya Priangan bagi orang Cina. Jika ditelusuri kembali riwayat kedatangan orang-orang Cina di Priangan, terlihat bahwa kebanyakan dari mereka adalah buruh kasar yang ikut mengerjakan pemasangan jalur kereta api dari Bogor sampai ke Bandung. Jalur transportasi kereta api telah mulai beroperasi dari Bandung sejak tahun 1884 (Lubis dkk, 2000:126).

Ada cerita menarik diseperti kehidupan orang Cina ketika itu. Pembangunan jalur kereta api Priangan yang mendaki gunung, menerobos hutan, melewati jurang dan sawah, jauh dari kampung tempat hunian penduduk, mengakibatkan kesulitan dalam pengadaan bahan pangan bagi para kuli pekerja. Mengatasi kesulitan itu, kuli-kuli Cina membekali diri dengan sejenis kue keras terbuat dari tepung wijen, yang dapat tahan sampai beberapa minggu. Itulah sebabnya sekarang, di kota-kota kecil yang dilalui proyek pembangunan jalur

kereta api itu; Cicurug, Sukabumi, Cianjur, banyak orang yang mengolah kue-kue tahan lama antara lain; cakue, ampyang, dan kue Moho (Kunto, 1986:506-508).

Sejak 1810, perkampungan Cina di Priangan berada di ibukota kabupaten seperti Cianjur, Bandung, Parakamuncang, Sumedang, Sukapura, Limbangan, dan Galuh. Di Bandung, orang-orang Cina semula tinggal di Banceuy. Namun setelah jumlah orang Cina bertambah, kemudian disediakan tempat di kota bagian barat (sekarang disebut Pasar Baru) yang disebut Pecinan. Daerah bekas pemukiman orang Cina di Banceuy kemudian disebut Pecinan Lama.

Seperti yang terlihat dalam realitas masyarakat Cina sekarang, sebagian besar orang Cina di Indonesia tinggal di kota-kota. Perkampungan Cina di kota-kota itu, termasuk dalam hal inidi Bandung, biasanya merupakan deretan rumah-rumah yang berhadapan di sepanjang jalan pusat pertokoan. Satu hal yang menarik, gambaran stereotip orang Cina adalah mereka yang tinggal di daerah perkampungan kotor. Pecinan terkonstruksi berada di dekat pasar. Deskripsi kebiasaan orang Cina, duduk-duduk di bangku, dengan pakai *singlet* dan celana kolor, atau terkadang hanya memakai piyama. Teriakan suara ribut saat ngobrol sambil makan kwaci menjadikan stereotip tentang orang Cina hadir dan merefleksikan etnis Cina pada tiga masa kekuasaan.

Pada tahun 1874, orang Cina yang tinggal di Bandung baru berjumlah enam umpi (keluarga). Salah seorang Cina yang berprofesi sebagai tukang kayu pada masa itu bernama Tam Long. Nama tukang kayu itu kemudian menjadi nama sebuah jalan yaitu Jalan Tamblong (Kunto, 1986:832). Selain itu juga dapat ditemui orang Cina yang berprofesi sebagai pemangkas rambut dan mengorek kotoran telinga dengan alat yang disebut "kili-kili" (Kunto, 1984:173).

Satu hal yang juga menarik untuk dilihat adalah keberadaan restoran Cina yang cukup banyak ditemui di Bandung pada masa itu. Bandung merupakan surga bagi para penikmat

jajanan. Salah satu jajanan yang dibuat oleh orang Cina di Bandung dan masih cukup terkenal hingga sekarang adalah bacang ketan buatan Nyonya Jauw.

Pada awal abad ke-20, makanan kecil yang diedarkan oleh orang Cina adalah "kembang tahu". Adapun rumah makan Cina yang cukup terkenal pada tahun 1930an adalah *Hoa Sang* di Jalan ABC. *Sin Ah* di prapatan Jalan Pasar Baru Suniaraja. Namun pada saat itu restoran-restoran besar masih langka. Pada tahun 1950an, rumah makan yang cukup terkenal adalah *Gie Lung* di Jalan Suniaraja, *Jat Lie* di Jalan Pecinan Lama, dan *Hong Sin* di Banceuy. (Kunto, 1986:512).

Namun ternyata, pada masa pemerintahan Hindia Belanda ada citra buruk tentang rumah makan Cina yang kotor. Hal ini mempengaruhi penguasa *gemeente* Bandung. Pemerintah Hindia Belanda merasa perlu mengadakan pengawasan ketat dalam bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan di daerah Pecinan. Hal ini terutama pengawasan kesehatan dan kebersihan dari hidangan makanan dan minuman di warung atau restoran Cina di Bandung (Kunto, 1986:511).

Sejak tahun 1925, warung dan restoran Cina di Bandung mengalami pembatasan-pembatasan. Hanya rumah makan yang memenuhi standar kesehatan dari *gemeente* Bandung yang diperkenankan meneruskan usahanya. Selain keadaan kondisi dapur yang harus bersih dan teratur, juga kerapian dan kesehatan dari koki, terkena pengawasan.

Seperti diketahui bahwa pembangunan jalan rel kereta api yang melewati Bandung memberi dampak positif. Hal ini juga berdampak bagi orang Cina di Bandung. Stasiun Bandung yang menjadi tempat alih penumpang membuat munculnya rumah makan dan penginapan mulai kelas rendah sampai kelas menengah di sekitar stasiun. Bagi orang-orang Cina di Bandung, hal ini merupakan kesempatan untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, muncul toko-toko dengan berbagai jenis barang dagangan milik orang-orang Cina. Dalam hal ini Pasar Baru yang tidak jauh dari stasiun tentu saja menjadi pusat perbelanjaan.

Menurut cerita W. H. Hooqland yang dikutip oleh Haryoto Kunto, mereka yang pulang larut malam sehabis nonton keramaian di alun-alun sedangkan rumahnya di wilayah Bandung Utara dapat dipastikan tidak akan mengambil Jalan Braga atau Banceuy. Pada awal abad ke-20 Jalan Braga sangat sepi, sedangkan ujung Jalan Banceuy masih merupakan kuburan Cina dan Belanda dengan sebutan *Sentiong*. Oleh karena itu, satu-satunya jalan yang diambil harus memutar, melewati Pecinan dan Pasar Baru. Hanya di tempat itu kehidupan malam berlangsung sampai subuh (Kunto, 1986:836).

Dalam bidang politik, walaupun ada kecenderungan bahwa orang Cina tidak tertarik pada bidang politik, namun muncul dua tokoh Cina dari Bandung, Ang Jan Goan dan Yap Tjwan Bing. Keduanya ikut mendukung berdirinya Persatuan Tionghoa pada tanggal 23 Mei 1948. Persatuan Tionghoa didirikan di daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda termasuk dalam hal ini Bandung.

### ***Minding, Kumiai dan Perdagangan Ilegal***

Hari itu, menjelang lebaran, tanggal 15 Januari 1930, ada iklan potongan harga hingga 50% untuk berbagai barang manufactur di sebuah toko di sekitar Pasar Baru No. 32. Toko itu bernama Paris Bazar. Pemilik tokok itu orang Cina.. Ternyata, tidak jauh dari tempat itu, tepatnya di *Bragaweg* ada sebuah toko milik orang Belanda dengan nama *Au Bon Marche*. Meski *Au Bon Marche* tidak menawarkan potongan 50% tapi harga barang ditawarkan sedemikian menarik. Artinya, geliat siasat Cina dengan iklan potongan 50% adalah nomena menarik yang terus berkembang hingga kini. Artinya, di Bandung, pada masa itu memang terlihat ada persaingan dagang yang ketat antara orang-orang Eropa dalam hal ini orang-orang Belanda dengan orang-orang Cina.

Tak jelas, toko Cina atau Toko Belanda yang banyak diminati para pribumi. Yang pasti, menurut Ong Eng Die, sebenarnya orang-orang Cina memiliki kelebihan yang tidak dimiliki

orang Eropa dalam berdagang. Seperti hubungan yang intensif antara pedagang Cina dengan konsumen-konsumen pribumi, membuat mereka lebih mengenal kebutuhan dan selera golongan yang disebut terakhir ini ( Tan ed., 1979:39).

Di Bandung juga terdapat pedagang-pedagang Cina yang disebut pedagang kelontong. Pedagang-pedagang kelontong ini, yang biasanya menjajakan barang-barang jadi, tidak hanya berkeliling kota saja, tetapi sering pula ke desa-desa dan kampung-kampung yang terpencil untuk menawarkan barang-barang kepada penduduk (Tan ed., 1979:45)

Perdagangan kelontong biasanya dilakukan bersamaan dengan pemberian kredit kepada pembeli pribumi, yaitu menjual barang atas dasar kredit ataupun meminjamkan uang kontan, lepas dari soal jual beli. Bahkan kadang-kadang terjadi hal yang aneh, sehingga orang tidak dapat membedakan apakah di sini terjadi perjanjian beli atau pinjaman uang.

Sebagai akibat hubungan kredit inilah kadang-kadang pedagang-pedagang kelontong Cina mendapat nama jelek di kalangan penduduk desa. Hal ini karena kredit yang diberikan biasanya berbunga tinggi. Pedagang-pedagang kelontong yang juga dinamakan Cina *Mindring* atau Tukang *Mindring* itu dianggap lintah darat dan pemeras.

Di Bandung juga terkenal Cina *Mindring*. Mereka berkeliling ke desa-desa atau pasar-pasar dalam rangka menagih bunga atau riba dalam beberapa sen. Keuntungan beberapa sen itu diperoleh dari hasil meminjamkan sejumlah kecil uang kepada cukup banyak pelanggan. Terutama terdiri dari pedagang kecil, pedagang penjaja, istri petani yang berjualan di pasar atau di pinggir jalan. Cina *Mindring* mendapat modal dari hasil meminjam kepada sesama orang Cina yang lebih kaya (Tan ed., 1979:50).

Orang Cina berpendapat, bahwa meminjamkan uang dengan bunga adalah hal yang biasa. Sistem kredit berbentuk uang, barang, atau apapun bentuknya, bagi mereka merupakan mata pencaharian di negeri yang miskin modal. Selain itu, hukum pinjam meminjam uang tidak luput dari hukum permintaan dan penawaran, seperti juga urusan-

urusan uang lainnya antara orang Cina dan pribumi. Orang Cina memungut bunga yang setinggi-tingginya, mengambil yang dapat diambil. Pada pihak pribumi ada kelemahan-kelemahan yang menyebabkan mereka mudah menjadi mangsa. Penggunaan utang tanpa pertimbangan kurangnya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran uang, kurangnya kemampuan untuk bekerja keras, inilah kelemahan-kelemahan utama yang menyebabkan mereka menjadi korban Cina *Mindring* (Gutem, 1918:8).

Sebenarnya, ada usaha pemerintah untuk mengatasi dampak *mindring*. Pada tanggal 22 Pebruari 1927, telah didirikan *Anti Woekervereniging* (Perkumpulan Anti Rentenir) dengan Residen Priangan, E. Tacoma, duduk sebagai pelindung organisasi ini. Perkumpulan anti rentenir ini menerima pengaduan dari para korban rentenir dan memberi bantuan hukum secara gratis kepada mereka.

Dalam masa bakti selama 12 tahun, 1927 sampai dengan 1938, perkumpulan anti rentenir telah berhasil menangani sampai tuntas, kasus-kasus pengaduan tentang lintah darat. Kasus-kasus tersebut terdiri dari : 1.491 kasus yang menimpa orang Eropa, tujuh puluh lima kasus yang menimpa orang Cina, satu kasus yang menimpa orang Arab, dan 1.883 yang menimpa penduduk pribumi (Kunto, 1986:856). Komposisi ini dapat memperlihatkan bahwa usaha *mindring* ternyata bukan hanya menyentuh lapisan terbawah dari komposisi masyarakat pada saat itu, tapi juga dikalangan orang-orang Eropa.

Pada masa pendudukan Jepang, seperti halnya dengan masyarakat Indonesia, warga Cina pada umumnya dan kalangan pengusaha khususnya, dieksploitasi demi perang yang diantaranya adalah untuk menutup pengeluaran militer dan dana administratif. Kontribusi finansial diwajibkan untuk tujuan ini. Di Jawa, tidak ada jumlah spesifik yang ditetapkan. Akan tetapi, berbagai macam pajak dikenakan di sepanjang masa pendudukan Jepang.

Salah satu sistem yang diperkenalkan oleh Jepang adalah *kumiai* (serikat pekerja atau koperasi). Masing-masing jenis usaha mulai dari perdagangan dan industri sampai

transportasi dan pertanian, memiliki *kumiai* sendiri-sendiri; beberapa di antaranya bergabung hingga menjadi lebih besar dan lebih luas. Satu ciri umum *kumiai* antar etnis adalah bahwa saham dibagi dalam jumlah yang sangat signifikan. Selain itu, dalam beberapa kasus, jumlah saham yang dimiliki perorangan terkesan sangat dibatasi (Twang, 2004:97).

Di Bandung terdapat *kumiai* pengusaha beras yang mengumpulkan aset sebesar 83.500 gulden dari sekitar enam belas anggota pemegang sahamnya. Yang cukup menarik, karena dari enam belas anggotanya, sepuluh diantaranya adalah orang pribumi, Pengenalan sistem *kumiai* seperti ini memiliki konsekuensi penting bagi pengusaha Cina dan orang-orang Indonesia yang menduduki jabatan penting *kumiai*. Di dalam wadah ini, etnis Cina berbagi kemampuan, pengetahuan, dan pengalamannya, sementara rakyat Indonesia akan menyumbangkan apa yang mereka miliki demi kemakmuran bersama. Setelah terbentuknya *kumiai* banyak pengusaha dan asosiasi dagang Indonesia yang bermunculan.

Bagi orang Cina di Bandung, *kumiai* tentu saja juga berdampak positif. Hal ini karena, wadah ini dapat mereka gunakan agar terjadi relasi yang sangat erat dan saling menguntungkan dengan pribumi. Di tengah kebijakan pendudukan Jepang yang sangat berat, tentu saja relasi positif dengan pribumi sangat dibutuhkan.

Kontrol pihak Jepang terhadap lesunya perekonomian berpengaruh besar terhadap bisnis Cina secara umum, Muncul beragam bentuk larangan dan pengawasan pada berbagai sektor ekonomi. Bahkan hal ini berimbas sampai setelah Kemerdekaan Indonesia. Larangan dan Pengawasan yang ketat ini malah menimbulkan perdagangan ilegal dalam skala yang cukup besar di Bandung.

Akhir Juli 1946, terjadi perdagangan ilegal skala besar di Bandung dan Jakarta, dengan barang dagangan utamanya adalah gula. Ada kasus, seorang pengusaha Cina berkolaborasi dengan personel militer dalam perdagangan seperti ini. Sepuluh ton gula diangkut dengan *konvoi* militer dari Bandung ke Batavia. Harga gula di Bandung adalah 0.8

gulden perkilogram dan dijual 2,60 gulden di Batavia. Dengan laba kotor lebih dari 300% seperti ini, transaksi barang-barang di atas bisa mencapai 18.000 gulden. Perjalanan pulang juga menjadi transaksi yang sama-sama menguntungkan. Gula-gula tersebut dibayar dengan buncis yang harganya di Batavia 2,25 gulden per kilogram dan mencapai 4,75 gulden di Bandung, maka laba bersih yang didapat adalah 25.000 gulden, sehingga menambah jumlah total keuntungan dalam perdagangan dua arah ini menjadi 43.000 gulden (Twang, 2004:247).

Selain itu, penyeldupan paling aktif ternyata berkaitan erat dengan perusahaan-perusahaan negara dan kalangan revolusionis di berbagai daerah, termasuk di Bandung. Penyeludupan paling aktif ternyata berkaitan erat dengan perusahaan-perusahaan negara dan kalangan revolusionis di berbagai wilayah. Meski tidak semua penyeludup aktif ini adalah pengusaha kaya di masa revolusi, sebagian besar di antaranya demikian adanya. Ada lima firma dan individu Cina di Bandung yang terlibat aktivitas penyeludupan: Djauw Pok Kie, Fu Hin, Sampoerna Group, Belitung, dan Wang Tong (Twang, 2004: 331).

Hal ini dapat dikatakan salah satu bentuk usaha orang-orang Cina di Bandung memanfaatkan peluang secara cepat dan tepat, dengan kreativitas yang mereka miliki walaupun dengan menomorduakan cara. Di tengah pembatasan yang terjadi pada kehidupan orang Cina, mereka menemukan peluang untuk bergerak di perdagangan ilegal. Walaupun tentunya hal ini beresiko cukup tinggi.

Pada tahun 1950, Belanda meninggalkan Indonesia. Kekosongan perdagangan di daerah-daerah dengan cepat diisi oleh orang Cina, sehingga dengan demikian orang Cina semakin menguasai kehidupan ekonomi perdagangan. Pemilik perusahaan besar, perantara, perusahaan kecil dan pengecer, sebagian besar kemudian berada di tangan orang Cina.

Selanjutnya, pemerintah kembali lagi mengadakan pembatasan-pembatasan usaha kepada orang-orang Cina, khususnya bagi mereka yang masih warga negara asing. Pembatasan ini mulai berlaku dengan adanya peraturan No. 10 Tahun 1959, semua WNA

Cina hanya diperkenankan berusaha terbatas di sekitar kota-kota Daerah Tingkat I dan II. Dengan berlakunya peraturan ini semua modal-modal Cina terpusatkan di kota-kota.

Namun, perlindungan terhadap pedagang pribumi dan pemaksaan pedagang kecil Cina keluar dari pedesaan tidak berhasil memperkecil peran orang Cina dalam bidang ekonomi Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia harus membekukan pelaksanaan PP. 10 untuk mengelakkan kehancuran ekonomi dan ketidakstabilan politik.

## **Penutup**

Perilaku adaptasi orang Cina di Bandung, pada hakekatnya menunjukkan kemampuan untuk merasakan dan/atau menerima informasi yang pada akhirnya melahirkan etos sikap untuk tetap survive. Ada usaha-usaha tertentu, ada trik-trik siasat tertentu, ada pendekatan kultural tertentu agar dapat menyesuaikan dengan situasi yang ada. Situasi yang terkadang tidak nyaman di tengah kebijakan yang cenderung diskriminatif tidak membuat mereka undur langkah dari pertarungan ekonomi.

Penulis berpendapat ada tiga faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang Cina di Bandung melakukan siasat. *Pertama*, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan penguasa terhadap orang Cina yang cenderung membatasi ruang gerak ekonomi orang Cina di Bandung. Hal ini menyebabkan timbulnya keinginan orang Cina di Bandung melakukan siasat agar tetap bisa melakukan aktivitas ekonomi, dengan mencari peluang-peluang tertentu walaupun terkadang dengan cara-cara ilegal. *Kedua*, posisi orang Cina sebagai kelompok minoritas membuat mereka harus berusaha untuk bisa bertahan hidup di tengah himpitan kelompok mayoritas. Apalagi jika dikaitkan dengan posisi mereka sebagai migran. *Ketiga*, pembatasan ruang gerak orang Cina di Bandung dengan diterapkannya kebijakan *Wijkenstelsel* dan *Passenstelsel*. Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, akan tetapi juga berlaku pada masa Pendudukan Jepang.

Ruang gerak yang terbatas menyebabkan orang Cina di Bandung harus memanfaatkan potensi yang ada disekitar Pecinan. Pecinan ternyata tetap menjadi pusat kehidupan ekonomi kota, sehingga walaupun mereka tidak dapat melakukan aktivitas bisnis di luar pecinan, namun penduduk pribumi tetap masuk ke pecinan untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Dalam tiga rejim yang berkuasa, ada persamaan siasat ekonomi yang dilakukan oleh orang Cina di Bandung. Orang Cina di Bandung berusaha mencari peluang-peluang ekonomi, yang tidak bersinggungan dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu dan memanfaatkan sebaik mungkin relasi sosial orang Cina dengan penduduk pribumi. Hal inilah, yang dapat menjelaskan bagaimana usaha orang Cina di Bandung untuk bisa bertahan hidup di tengah tekanan kebijakan pemerintah pada saat itu.

Pada hakekatnya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada siasat orang Cina di Bandung dalam menghadapi kebijakan penguasa. Cara bersiasat orang Cina di Bandung lakukan adalah hasil dari memanfaatkan segala potensi yang ada dalam diri serta melihat peluang yang mungkin dapat diambil. Perilaku responsif orang Cina terhadap perubahan-perubahan lingkungannya untuk kemudian mendesain sistem-sistem tertentu bagi tindakan atau tingkah laku mereka agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada.

Siasat bagi orang Cina di Bandung adalah suatu usaha terus menerus melintasi beberapa masa pemerintahan. Harapan untuk tetap bisa bertahan hidup walaupun terkadang ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdurachman, Aan dkk. 2000. *Saya Pilih Mengungsi: Pengorbanan Rakyat Bandung untuk Kedaulatan*. Bandung: Pustaka Madani.

Adimihardja, Kusnaka. 1976. *Perkembangan Penduduk dan Aktivitas Ekonomi Orang-Orang Cina di Kotamadya Bandung*. Bandung: Lembaga Pendidikan dan Penelitian Sosial.

Aditjondro, G.J. 1978. *Dari Pecinan sampai Nan Yang; Suatu Introduksi Tentang Kewiraswastaan Orang Cina di Indonesia*. Jakarta: KITLV

Alatas. 1988. *Mitos Pribumi Malas*. Jakarta: LP3ES.

Bennet, John William. 1976. *Adaptation and the Formation of Minority Groups: The Dutch Experience 1945-1975*. London: Cambridge University Press.

Cator, Writser Jans. 1936. *The Economic Position of The Chinese in The Netherlands Indie*. Oxford: Basil Blackwell.

Cohen Yehudi. 1971. *Man in Adaptation: The Institutional Framework*. Aldine Atherton.

Fernando, M.R. dan David Bulbeck eds. 1992. *Chinese Economic Activity in the Netherlands India: Selected Translation from the Dutch*. Singapore: ISEAS.

Hamilton, Gary. 1996. *Menguak Jaringan Bisnis Cina di Asia Timur dan Tenggara*. Jakarta: Gramedia.

Hidajat. 1977. *Masyarakat dan Kebudayaan Cina di Indonesia*. Bandung: Tarsito.

Jahja, Yunus. 2003. *Peranakan Idealis; Dari Lie Eng Hok sampai Teguh Karya*. Jakarta: Perpustakaan Populer Gramedia.

- Lohanda, Mona. 2001. *The Kapitein Cina Of Batavia 1973-1942*. Jakarta: Djambatan.
- Lohanda, Mona dkk. 2002. *Antara Prasangka dan Realita; Telaah Kritis Wacana Anti Cina di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Inspirasi
- Liem Twan Djie. 1995. *Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa; Suatu Studi Ekonomi*. Jakarta: KITLV dan Gramedia.
- Lubis, Nina H. Dkk. 2000. *Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat*. Bandung: Alqaprint.
- Noordjanah, Andjarwati. 2004. *Komunitas Tionghoa di Surabaya (1900-1946)*. Semarang: Mesiass.
- Onghokham. 1996. *Pengaruh Sistem Budaya Terhadap Etika Bisnis Cina*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pardede, Andreas dkk. 2002. *Antara Prasangka dan Realita; Telaah Kritis Wacana Antio Cina di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Inspirasi.
- Poerwanto, Hari. 2005. *Orang Cina Khek dari Singkawang*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Suryadinata, Leo. 1984. *Dilema Minorotas Tionghoa*. Jakarta: Grafiti Press.
- . 1986. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- . 2002. *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Tan, Mely G. 1979. *Etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Tan, Mely G ed. 1979. *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia; Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: LEKNAS LIPI dan Yayasan Obor Indonesia.
- Twang Peck Yang. 2004. *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan*. Yogyakarta: Niagara.
- Wakhid, Abdul. 1999. "Modal Cina dan Nasionalisme Indonesia: Industri Pers Cina Pada Msa Pergerakan Nasional". *Masyarakat Cina di Indonesia Pada Masa Kolonial*. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM.

## **B. Koran dan Majalah**

*Kaoem Muda*, 15 pebruari 1930.

*Kengpo*, 6 Januari 1947

*Kengpo*, 7 Januari 1947

*Sin Bin*, 15 Juli 1925

*Sin Bin*, 5 Oktober 1925

*Sin Bin*, 6 Oktober 1925

*Sin Bin*, 7 Oktober 1925

*Tempo*, Edisi 16-22 Agustus 2004